

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan ke 3, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam penanganan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, cet. Ke-4, Genta Publishing, Yogyakarta.
- _____, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2001, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- HR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Kantaadmaja, Mieke Komar, 2002, *Cyber Law: Suatu Pengantar*, Jakarta, ELIPS.
- Lamintang, P.A.F, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- _____, dan Fransiscus Theojunior Lamintan, 2018, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ke-3, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maroni, 2013, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, Anugrah Utama Rahardja, Lampung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan ketujuh, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 1987, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Univesitas Diponegoro, Semarang.
- Muladi dan Diah Sulistyani, 2016, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana Dan Kebijakan Kriminal*, Alumni, Bandung.
- Nasaruddin, Irsan, Indra Surya, Ivan Yustiavanda, Arman Nefi, Adiwarmanto *et al.*, 2014, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Cetakan ke 8, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 21.
- Poernomo, Bambang, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Rahmah, Mas, 2015, *Hukum Pasar Modal*, Prenada Media, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.13.
- Safitri, Indra, 1998, *Transparansi Independensi dan Pengawasan Kejahatan Pasar Modal*, Safitri & Co GO, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 32.
- _____, dan Sri Mammudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cet, ke-4, Alumni, Bandung.
- _____, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Usman, Marzuki, Mohammad Arif Singgih Riphath, Syahrir Ika, 1997, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, Jurnal Keuangan dan Moneter dengan Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

Utrecht, E., 1994, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Yulia Qamariyanti, Tavinayati, 2009, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

Eman Sulaeman, *Kebijakan Penggunaan Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Hukum Administrasi*, Wahana Akademika, Volume 1, Nomor 1, April 2014.

Hamud M. Balfas, *Kejahatan Di Pasar Modal: Sebuah Perkenalan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 24, Nomor 3, Juni 1994.

_____, *Tindak Pidana Pasar Modal dan Pengawasan Perdagangan di Bursa Efek*, Jurnal Hukum, Volume 6, Nomor 11, Juni 1999.

Ivan Fauzani Raharja, *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi terhadap pelanggaran Perizinan Inovatif* Jurnal Ilmu Hukum, Volume VII, Nomor II, 2 Mei 2014.

Ni'matul Huda, *Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Perundangan*, Jurnal Hukum, Volume 13, Nomor 1, 13 Januari 2006.

Nur Ainiyah Rahmawati, *Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remidium Atau Primum Remidium*, Recidive, Volume 2, Nomor 1, Januari - April 2013.

Nyoman Satya Yudha Dananjaya, *Sistem Peradilan Pidana terpadu (integrated criminal justice system) dikaji dari perspektif sub sitem Kepolisian*, Jurnal Ilmiah Agama dan Hukum, Volume IX, Nomor 1, September 2014.

Supriyadi, *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, Mimbar Hukum, Volume 27, Nomor 3, 3 Oktober 2015.

Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, Anak Agung Dian Onital, *Konstitusional Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remidium Dalam Pembentukan Perundang-undangan*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015, hlm. 877.

Wicipto Setiadi, *Sanksi Administrasi Sebagai Salah Satu Instumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 6, Nomor 4, 14 Desember 2019.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Daud tarigan, 2014, *Peranan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Penyelidikan Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal*, Tesis, Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada.

Astrid Unggul Pawestri, 2011, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Manipulasi Pasar Modal Indonesia*, Skripsi, Sarjana Hukum, Universitas Gadjah Mada.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).

Undang- Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3258).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3617).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3618).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5145).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5785).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2018 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6287).

Peraturan II. A Kep-00168/BEI/11-2018 tentang Perubahan Peraturan Nomor II.A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP – 42/PM/1997 Tentang Transaksi Efek (Peraturan Nomor III.A.10).

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 5 Januari 2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 18 Desember 2019.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL, 24 Juni 2019.

F. Internet

Ali Husein Mubarak “Mekanisme Pasar Sekunder dan Fungsi Lembaga Dalam Pasar Modal Indonesia” <https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/V-01-No-03-mekanisme-pasar-sekunder-dan-fungsi-lembaga-nya-dalam-pasar-modal-indonesia-ali-husein-mubarak.pdf>, diakses tanggal 14 April 2020.

Aneka Majalah, “Field Research (Penelitian Lapangan)”, <https://www.anekamakalah.com/2012/05/field-research-penelitian-lapangan.html>, diakses 25 februari 2020.

Indriyanto Seno Adji, “Sistem Hukum Pidana & Keadilan Restoratif”,
https://www.bphn.go.id/data/documents/fgd_dphn_prof._indriyanto_seno_aji.pdf, diakses pada tanggal 15 Juli 2020.

Otoritas Jasa Keuangan “ OJK Tetapkan Sanksi Administratif Terhadap Vivilia Valentina, Rizal Andrika, Liauw Mei Tjin, dan Abi Said Karena Langgar Aturan Bidang Pasar Modal” <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/OJK-Berikan-Sanksi-Terhadap-Vivilia-Valentina-Rizal-Andrika-Liauw-Mei-Tjin-dan-Abi-Said-atas-Kasus-Perdagangan-Saham.aspx> diakses pada tanggal 10 Februari 2010.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan “Sistem Informasi Penelusuran Perkara”,
http://sipp.pn-jakartaselatan.go.id/index.php/detil_perkara diakses pada tanggal 10 februari 2020.